

ANALISIS TATA KELOLA HASIL PERTANIAN KOPI BERKUALITAS EKSPOR (Studi di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)

Ruth Agnesia Sembiring¹, Veri Samaria Silitonga²

^{1,2} Universitas Brawijaya

E-mail: nesi.biring@gmail.com; verisilitonga20@student.ub.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini membahas tentang analisis tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor di Kecamatan Dampit. Pentingnya analisis tata kelola hasil pertanian kopi di Kecamatan Dampit, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya penghasilan petani kopi, dapat meningkatkan kualitas dan sumber ekspor kopi dari Kabupaten Malang dan juga dapat lebih memperbaiki struktur pengolahan hasil pertanian kopi yang baik. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam menjabarkan analisis tata kelola dalam pengelolaan kopi Dampit berkualitas ekspor, peneliti menggunakan Good Governance, yang dimana ada tiga indikator yang terkait yakni, pemerintah, swasta dan masyarakat. Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa BPP Dampit sebagai bagian dari pemerintah memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang budidaya tanam yang diberikan kepada masyarakat. Swasata yakni PT Asal Jaya terlibat dalam pendanaan, membuka akses pasar dan menjual produk kopi ke pasar global. Pemerintah dan swasta sama-sama memberikan alat pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen kopi. Masyarakat juga memiliki peran dalam menghasilkan kopi dan melaksanakan program-program penyuluhan yang diberikan. Dari tata kelola tersebut, produksi kopi berkualitas ekspor meningkat dan kopi asal Dampit telah memiliki sertifikasi 4C. Pemerintah telah menciptakan mekanisme resmi pemasaran kopi ke luar negeri, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih lemah dalam menciptakan mekanisme harga komoditas kopi di pasar nasional dan belum mampu mengatasi penurunan harga kopi di pasar global. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memonitor monopoli harga komoditas kopi di pasar nasional, memetakan bantuan pertanian berdasarkan urgensi kebutuhan petani, dan peningkatan peran untuk mengatasi penurunan harga komoditas kopi di pasar global.

Kata kunci; Kecamatan Dampit, Kopi, Kualitas Ekspor, Tata Kelola.

AN ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL PRODUCT GOVERNANCE FOR EXPORT- QUALITY COFFEE (A Study of Dampit Sub-District of Malang Regency)

ABSTRACT. This research analyzes the governance of agricultural product, particularly the export-quality coffee, in Dampit sub-district. The analysis is important as it can help improve people's economy – particularly the income of coffee farmers, enhance the quality and the source of exported coffee from Malang regency, and upgrade the structure of coffee product processing. This descriptive qualitative research was conducted to explain the governance of export-quality coffee as an agricultural product of Dampit and to explain parties involved in the processing of export-quality coffee in the sub-district. In order to analyze the governance used in the processing of export-quality Dampit coffee, this research uses Good Governance, which has three indicators: government, private, and community. This study finds that the BPP (Agricultural Counseling Center) of Dampit as a part of the government have held counseling sessions for the community about cultivation. The private party, in this case PT Asal Jaya, was involved by providing funds, opening market access, and selling the agricultural product to global markets. The government and private sector both provide modern farming tools to increase coffee yields. The community have played their role by producing export-quality coffee and carrying out the agricultural programs laid out during the counseling sessions. From this governance, export-quality coffee production has increased and coffee from Dampit has 4C certification. The government has created an official mechanism to market coffee abroad, but the central and local governments are still weak in creating a price mechanism for coffee commodities in the national market and have not been able to overcome the decline in coffee prices in the global market. Therefore, the central government and local governments need to monitor the monopoly of coffee commodity prices in the national market, map agricultural assistance based on the urgency of farmers' needs, and increase their role to overcome the decline in coffee commodity prices in the global market.

Keywords; Coffee, Dampit Sub-District, Export Quality, Governance.

PENDAHULUAN

Kecamatan Dampit merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Letak geografi sebagian desa di Kecamatan Dampit adalah dataran, sebagian lagi berupa lereng dengan topografi tergolong datar dan perbukitan. Wilayah Dampit merupakan sebuah kecamatan penghasil kopi terbesar di Kabupaten Malang. Selain Kecamatan Dampit, potensi biji kopi di Kabupaten Malang tersebar ke 3 kecamatan lain yang ada di Selatan Kabupaten Malang, yaitu: Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Dari keempat kecamatan penghasil kopi tersebut lahirlah istilah “Amstirdam” (Malang Times, 2017).

Produksi kopi Robusta asal Dampit digunakan oleh cafe atau kedai kopi modern di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Makassar. Selain pasar nasional, pemasaran kopi asal Dampit juga telah menjangkau pasar internasional. Agar dapat bertahan dalam persaingan pasar internasional, kopi asal Dampit harus tetap memenuhi standar kualitas ekspor. Dalam tata kelola kopi asal Dampit yang berkualitas ekspor, tentu tidak hanya dibebankan kepada para petani kopi tapi juga membutuhkan peran dari pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang secara khusus fokus pada Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit. Pihak swasta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan eksportir kopi yang terhubung dengan pasar internasional. Menurut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, ada beberapa eksportir kopi dari Kabupaten Malang yaitu: CV. Kharisma Nusantara di Dampit; PT. Asal Jaya di Dampit; PT. Gemilang Sentosa Permai di Singosari; CV. Dwi Jaya di Dampit, dan PT. Anugerah di Dampit (Tabloid Jawa Timur, 2020).

Pada penelitian ini, penulis fokus untuk menganalisis tata kelola hasil pertanian kopi

berkualitas ekspor di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tata kelola kopi berkualitas ekspor yang melibatkan pemerintah, masyarakat khususnya para petani kopi dan pihak swasta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi asal Dampit. Tata kelola kopi berkualitas ekspor dicapai melalui kerjasama, program penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta, pendampingan bagi para petani kopi maupun penyediaan alat-alat produksi kopi. Konsep *governance* digunakan untuk menganalisis tata kelola kopi berkualitas ekspor di Dampit. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Analisis tata kelola kopi berkualitas ekspor di Dampit penting dilakukan sebab peran masing-masing aktor yang terlibat dalam tata kelola, yaitu pihak pemerintah melalui BPP Dampit, PT Asal Jaya dan masyarakat (petani kopi) harus seimbang. Jika peran swasta dalam tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor terlalu besar dikhawatirkan dapat menciptakan monopoli perdagangan dan nilai jual kopi. Peran swasta yang terlalu besar pada tata kelola kopi berkualitas ekspor juga dapat menimbulkan eksploitasi terhadap para petani kopi dan eksploitasi terhadap lahan pertanian kopi yang dapat berdampak terhadap ekologi. Jika peran masyarakat melalui petani kopi yang terlalu besar dalam tata kelola kopi berkualitas ekspor juga dapat menimbulkan eksploitasi lahan pertanian yang berdampak terhadap ekologi karena petani berupaya memenuhi permintaan pasar internasional. Kehadiran pemerintah diperlukan dalam tata kelola kopi berkualitas ekspor karena dapat melindungi para petani kopi dan untuk menjaga kelestarian ekologi melalui kebijakan atau prosedur formal. Namun, jika peran pemerintah terlalu besar melalui kebijakan atau prosedur formalnya, dapat mempengaruhi minat investasi dari perusahaan eksportir kopi, apalagi jika kebijakan atau prosedur tersebut dianggap terlalu berbelit-belit.

Ada beberapa penelitian mengenai *governance* dan analisis tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor. Penelitian Sembiring dan Subekti menganalisis aktor dalam tata kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkualitas internasional di Kota Batu yang melibatkan masyarakat (pelaku UMKM), pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pihak swasta (Sembiring & Subekti, 2021). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu hanya mampu dijual di pasar lokal saja dan hanya ada sejumlah kecil UMKM yang berhasil menembus pasar internasional. Peran pemerintah pusat dan pemerintah lokal sangat minim pada awal UMKM dibentuk untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Hal ini ditandai dengan relasi UMKM dengan pihak swasta yaitu buyer asal luar negeri telah terjalin sebelum UMKM didaftarkan secara legal di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu. Walau menggunakan konsep yang sama, yaitu *governance* dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, tapi penelitian ini fokus terhadap tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor.

Penelitian Alqarni, dkk menganalisis peran pemerintah daerah untuk mendukung standarisasi kopi di Aceh menurut konsep *Value Chain Governance* (Alqarni et al., 2020) dengan studi pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peran lembaga legislatif dalam standarisasi meliputi: kerjasama dengan pihak standarisasi tingkat internasional yaitu Organization for Standardization (ISO); aturan dalam penanaman kopi dengan pupuk organik; sertifikat International Organization for Standardization (ISO) pada perusahaan atau produk kopi; dan sistem dokumentasi produk kopi. Peran lembaga eksekutif dalam standarisasi yaitu pembinaan terhadap kelembagaan dan manajemen; pelatihan untuk mengelola dunia usaha kepada petani kopi; pemberian modal kepada petani kopi; pengembangan jaringan distribusi kopi ke pasar internasional; pelatihan terkait penggunaan teknologi *e-commerce*; serta kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal

atau internasional dalam pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan kepada petani kopi. Peran yudikatif dalam standarisasi adalah membantu legislatif yaitu mengawasi implementasi aturan mengenai larangan penggunaan pestisida pada penanaman kopi; pengawasan dan kontrol terhadap kesehatan luwak dalam rangka menghasilkan kopi luwak yang berstandar internasional; dan pemberian *punishment* kepada petani kopi yang tidak melaksanakan standar yang ditentukan. Namun penelitian Alqarni, dkk tersebut hanya membahas peran atau posisi pemerintah dalam standarisasi kopi. Berbeda dengan penelitian penulis yang bukan hanya membahas posisi pemerintah dalam tata kelola kopi berkualitas ekspor, namun juga posisi pihak swasta dan posisi petani kopi.

Penelitian Munashiroh dan Santoso menganalisis pengembangan sektor unggulan komoditas kopi di Kabupaten Malang dengan konsep agribisnis untuk menentukan arah pengembangan komoditas kopi, memaksimalkan sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Munashiroh & Santoso, 2021). Penelitian tersebut menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa komoditi kopi menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekspor non-Migas terbesar di Kabupaten Malang, dimana kouta ekspor kopi Kabupaten Malang mencapai 66.292 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 131.113.756,83 pada tahun 2018. Penelitian tersebut juga memaparkan bahwa peningkatan permintaan kopi Kabupaten Malang di pasar dalam negeri maupun pasar luar tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tanaman kopi. Para petani juga mengalami masalah terkait fluktuasi harga jual kopi, penurunan produksi kopi tahun 2017 yang merugikan para petani karena petani masih menanggung biaya pemeliharaan kebun kopi. Penelitian tersebut menggunakan analisis Delphi untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi pengembangan komoditas kopi. Adapun variabel-variabel yang dihasilkan berdasarkan analisis Delphi, yaitu: 1) sarana

produksi: bibit, pupuk, pestisida; 2) usaha tani: ketersediaan lahan, kultur teknis; 3) pengelolaan dan pemasaran: kegiatan pascapanen, teknologi pengolahan, harga pasar, kuantitas permintaan kopi; 4) sumber daya manusia: kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; 5) infrastruktur: jalan, jaringan listrik, air bersih, pengairan, pasar, gudang; 6) kelembagaan: lembaga keuangan, pemerintah, swasta, masyarakat. Namun penelitian tersebut hanya membahas keenam variabel dalam pengembangan komoditas kopi secara umum. Tidak ada penjelasan mengenai siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan komoditas kopi tersebut untuk mendapat informasi mengenai proses pengembangan komoditas yang lebih rinci. Berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi mengenai siapa saja aktor yang terlibat dalam tata kelola hasil pertanian kopi, khususnya yang berkualitas ekspor dan memetakan aktor yang terlibat untuk memahami bagaimana proses tata kelolanya. Selain itu penelitian tersebut juga mengkaji daerah penghasil kopi di Kabupaten Malang secara umum, sementara penelitian penulis hanya fokus pada 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Dampit.

Penelitian Kafasaskya, dkk (2020) menganalisis hubungan antaraktor dalam ekspor komoditas jagung asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ke pasar Filipina tahun 2018. Konsep rantai nilai global dengan 4 (empat) dimensi digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu: tata kelola, daya saing, *upgrading*, dan sinergi antaraktor (Kafasaskya, 2020). Rantai nilai adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam menciptakan produk, yaitu komoditas jagung asal NTT mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Penelitian tersebut memetakan beberapa aktor tata kelola komoditas jagung asal NTT: pemerintah daerah melalui dinas pertanian setempat; petani jagung; PT Segar Agro Nusantara; stasiun karantina pertanian; dinas perdagangan provinsi; perusahaan pembuat pakan ternak di Filipina; dan konsumen. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa jenis rantai yang terbentuk adalah *buyer-driven* atau pembeli

mempunyai pengaruh yang dominan, dan bentuk tata kelola adalah *captive value chains* yang artinya daya saing komoditas jagung Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada jumlah produksi, kualitas, dan tarif impor yang rendah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pihak pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan peran dalam memonitoring. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan ekspor jagung yang dilakukan oleh PT Segar Agro Nusantara ternyata menggunakan Surat Keterangan Asal dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain jagung yang diekspor ke Filipina tidak beratasnama Provinsi NTT. Walau sama-sama membahas tata kelola dan aktor yang terlibat dalam kegiatan ekspor hasil pertanian dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, namun penelitian penulis tidak menggunakan konsep *global value chain*, melainkan *governance*. Selain itu, penelitian penulis memiliki fokus dan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu tata kelola kopi berkualitas ekspor di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

Laporan penelitian yang dilakukan oleh Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project menganalisis rantai nilai global untuk ekspor kopi Indonesia (TPSA (Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project), 2017). Laporan penelitian tersebut menggunakan konsep *global value chain* dan menggabungkan data dari pemeriksaan komprehensif terhadap sektor kopi Indonesia, sejumlah wawancara dan survey langsung ke berbagai perusahaan di Indonesia. Hasil dari laporan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas kopi yang rendah; produksi masih diarahkan untuk jenis kopi yang memiliki nilai lebih rendah, yaitu Robusta; dan kondisi geografis merupakan hambatan dalam rantai nilai global untuk ekspor kopi asal Indonesia. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Pulau Jawa berada pada posisi kedua penghasil kopi terbesar di Indonesia setelah Sumatera. Namun penelitian tersebut membahas ekspor kopi Indonesia secara umum, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih spesifik membahas suatu wilayah kecamatan di

Kabupaten Malang. Selain itu penelitian penulis tidak menggunakan konsep *global value chain*, melainkan *governance* untuk menganalisis tata kelola pertanian kopi berkualitas ekspor.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data dari informan, kemudian melakukan analisis mengenai keberadaan dan relasi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan kopi asal Dampit berkualitas ekspor. Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan peninjauan langsung di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Dampit. Penulis mewawancarai beberapa aktor yang terlibat dalam tata kelola hasil pertanian kopi Dampit dengan metode *purposive*. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu: pihak Dinas Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit, PT Asal Jaya dan petani kopi Dampit.

Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para informan penelitian. Untuk pengumpulan data primer tersebut, penulis melakukan wawancara melalui pertemuan langsung terhadap informan-informan tersebut di atas; dan melalui *zoom meeting* secara khusus terhadap pihak BPP Dampit. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu pertanian kopi Dampit yang berkualitas ekspor. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari artikel karya ilmiah berupa penelitian sebelumnya; data dari dokumentasi media massa maupun tabloid yang memuat informasi mengenai tata kelola kopi Dampit; dan dokumen-dokumen dari BPP Dampit dan PT Asal Jaya.

Data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknis analisis data kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahap awal yaitu kondensasi data: penulis memilah atau mentransformasikan data-data

yang didapat dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara informan, observasi dari lokasi pertanian kopi di Dampit dan data-data dokumentasi dari pihak BPP Dampit, PT Asal Jaya dan petani kopi maupun media massa yang menyajikan informasi mengenai tata kelola kopi berkualitas ekspor Dampit. Tahap kedua yaitu penyajian data: penulis mengorganisir dan menyatukan data-data yang memungkinkan penyimpulan data dan aksi. Pada penyajian data, penulis juga melakukan analisis secara lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman konsep *governance* sebagai pisau analisis. Tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan: penulis melakukan analisis akhir secara eksplisit berdasarkan kondensasi data dan penyajian data agar dapat menjawab terhadap rumusan masalah yaitu bagaimana analisis dalam tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor di Dampit. Uji keabsahan data juga dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi data (Sugiyono, 2013), yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan sumber lain seperti laporan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), artikel ilmiah dan informasi dari media massa yang kredibel untuk *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan teori *good governance* sebagai pisau analisis dalam tata kelola hasil pertanian berkualitas ekspor. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga untuk mengatur sumber daya serta mengatasi masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah bukanlah aktor tunggal dan tidak selalu sebagai aktor penentu. Implikasi keterlibatan pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur mengalami pergeseran, dimana pemerintah menjadi pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain pada komunitas (Sumarto, 2003).

Governance menuntut definisi peran negara, dan adanya redefinisi pada peran warga. Pada *governance*, ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Menurut Rewansyah: “*Governance* (kepemerintahan) yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua *stakeholder* yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (*civil society*).”

Good governance menurut BC Smith (2007, dalam Rahim) merupakan kebijakan pembuka untuk mendirikan suatu penentuan yang kuat, dimana pembuat keputusan harus menciptakan sudut pandang setelah periode konsensus dalam institusi untuk pembuatan keputusan (Rahim, 2019). Pembuatan aturan yang produktif untuk institusi adalah tujuan utama badan terkait. Identifikasi masalah sosial dan politik diharapkan dalam mekanisme yang membutuhkan administrasi untuk rencana implementasi, dengan demikian, harus ada mekanisme yang kuat dari sistem politik dan sosial untuk memperkuat nilai ekonomis yang mungkin diterima oleh *good governance*. *Good governance* memiliki faktor-faktor menakutkan pada prinsipnya untuk menyediakan mekanisme yang kuat untuk mereformasi suatu sistem melalui transparansi dan sanksi yang kuat untuk korupsi, aturan hukum dan akuntabilitas. Menurut World Bank (Mardiasmo, 2009): “*Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political *framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Sadjijono menyatakan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma *good governance* yaitu (Sadjijono, 2005):

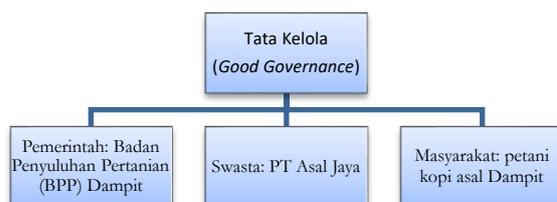
“Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.” Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pada *good governance* menurut Rahim, perusahaan multinasional dan perusahaan nasional dapat bekerja untuk mendapatkan kredibilitas dari negara dan itu bergerak dengan mengembangkan agenda patuh (Rahim, 2019). Pemerintah yang demokratis dapat memastikan kemungkinan adanya hubungan dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk pembangunan dalam wilayah, dengan demikian, demokrasi adalah langkah awal untuk kemakmuran dengan dikte *good governance*. Etika kebebasan bagi setiap warga dalam pertumbuhan politik dan ekonomi terlindungi dengan baik dalam pemerintahan demokratis. Di samping itu, perlu adanya hubungan yang erat antara warga negara dan pemerintah untuk memulai program yang berkembang dari tingkat proletar. Menurut Rahim, *good governance* merupakan tindakan vital untuk memberikan partisipasi yang setara dalam membentuk badan pemerintahan tentang hak-hak yang miskin, yang kaya, laki-laki, perempuan dan minoritas secara setara. Peran orang yang berbeda bisa produktif dengan motivasi yang tepat. *Good governance* merupakan elemen penting untuk menembus ke dalam sistem dengan nilai-nilai proaktif dari berbagai bahasa, pemeran, ras, agama dan budaya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan konseptual di atas, dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah interaksi antara pemerintah dengan warga negara untuk menentukan mekanisme dalam mengelola sumber-sumber daya pembangunan. Warga negara mencakup seluruh komunitas dalam masyarakat dan juga sektor swasta seperti perusahaan swasta.

Mekanisme yang terbentuk melalui interaksi tersebut diharapkan dapat mendorong peran produktif dari pemerintah, seluruh komunitas dalam masyarakat dan pihak swasta baik nasional maupun internasional untuk mengelola pembangunan. Peran produktif dari seluruh komunitas masyarakat dikembangkan dari tingkat proletar dan tingkat lokal. Dengan demikian peran dari pemerintah tingkat lokal atau pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dalam kondisi tersebut, ada tuntutan yang besar terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam penelitian ini, *governance* diwujudkan melalui interaksi pemerintah dengan warga negara untuk menentukan mekanisme tata kelola pertanian kopi berkualitas ekspor. Warga negara mencakup masyarakat (khususnya petani kopi) dan swasta (eksportir kopi). Mekanisme tata kelola pertanian kopi yang terbentuk dari interaksi ketiga aktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran produktif pemerintah, para petani kopi dan swasta untuk meningkatkan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti penyediaan sarana pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian kopi berkualitas ekspor, melainkan juga pembangunan nonfisik yaitu peningkatan pengetahuan para petani kopi dan peningkatan taraf hidup para petani kopi.

Pada kerangka pemikiran di bawah ini, penulis memetakan interaksi antara pemerintah dengan warga negara dalam tata kelola pertanian kopi sesuai dengan penjelasan teori *good governance* di atas.



Gambar 1: Kerangka pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Aktor dalam Tata Kelola Hasil Pertanian Kopi Berkualitas Ekspor

Dari 33 (tiga puluh tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit memiliki tanaman kopi Robusta terluas yaitu 3.373 ha dengan jumlah produksi 2.641 ton pada tahun 2019 (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2020). Kopi merupakan jenis tanaman perkebunan unggulan kedua di Kecamatan Dampit setelah tanaman perkebunan tebu. Tata kelola hasil pertanian kopi sejalan dengan misi pembangunan Kabupaten Malang 2019 s/d 2024 point ke-4 dan ke-5, yaitu: “Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk unggulan desa” (Pemerintah Kabupaten Malang, 2019). Dalam praktiknya, tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor di Dampit bukan hanya melibatkan pemerintah kabupaten melalui Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) saja, melainkan pihak swasta yaitu eksportir kopi dan para petani kopi.

1) Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit dalam Tata Kelola Hasil Pertanian Kopi Dampit Berkualitas Ekspor

Sejarah pendirian Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit diawali dengan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) pada tahun 1951. Pada tahun 1986 balai tersebut melaksanakan tugas di 4 (empat) wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading dan Sumbermajing Wetan (Pemerintah Kabupaten Malang, 2019). Pada tahun 2006 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dimana tiap kecamatan diwajibkan untuk menunjuk koordinator penyuluh dan dibentuk UPTD II sebagai kepanjangan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pada tahun 2008 di tingkat kabupaten didirikan BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan

Penyuluhan). Selanjutnya pada tahun 2017 badan tersebut berubah nama menjadi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit yang merupakan kepanjangan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Kegiatan BPP Dampit dalam membina petani dan kelompok tani; serta pelaksanaan sistem kerja Latihan, Kunjungan, Supervisi dan Evaluasi (Lakususi) mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/kpts/OT/160/4/2007. Kunjungan dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian sesuai dengan jadwal kunjungan. Supervisi dilaksanakan dengan melibatkan Koordinator Penyuluh, Penyuluh Supervisor dan KJF yang lain. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh penyuluh, petani dan kelompok tani di Kecamatan Dampit. Untuk pengelolaan BPP Dampit dilaksanakan berdasarkan Permentan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.

Keterlibatan BPP Dampit dalam tata kelola kopi berkualitas ekspor sejalan dengan salah satu program unggulan BPP Dampit, yaitu “Mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan di Kecamatan Dampit: Kopi, Padi, Jagung, Cabai, Tebu, Salak dan Pisang” (Badan Penyuluhan Pertanian Dampit, 2021). BPP Dampit sejauh ini telah mendorong para petani kopi di Kecamatan Dampit untuk menggunakan alat pertanian yang lebih modern (Silitonga, 2022a). BPP Dampit menyalurkan alat mesin tani kepada para petani kopi, seperti mesin *huller* yaitu mesin pengupas kulit kopi kering; *pulper* yaitu mesin pengupas kulit kopi basah; dan mesin sangrai yaitu mesin untuk menyangrai biji kopi menjadi biji kopi matang dan siap dikonsumsi. Sebelum ada penyediaan alat pertanian modern tersebut, para petani mengupas dan menyangrai biji kopi secara manual. Adapun penyaluran alat mesin tani kepada para petani kopi melalui BPP Dampit tersebut berkat bantuan dari pihak swasta yaitu perusahaan eksportir kopi. Penggunaan alat pertanian modern oleh para petani kopi juga sejalan dengan program unggulan BPP Dampit, yaitu “Penggunaan alat mesin tani (mekanisme pertanian) sebagai upaya meningkatkan efisiensi usaha tani” (Badan Penyuluhan Pertanian Dampit, 2021).

Program penyuluhan pertanian yang dilaksanakan BPP Dampit tersebut berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Pertanian (RKTPP) (Badan Penyuluhan Pertanian Dampit, 2021). Dalam RKTPP terdapat 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek teknis, aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek teknis mengarah kepada sistem pelaksanaan tata cara tanam yang baik dan benar, seperti budidaya tanaman dan penggunaan lahan secara “legowo.” Aspek ekonomi mengarah pada pemanfaatan lahan yang dapat dikelola menjadi lahan yang berwawasan agribisnis. Aspek sosial mengarah pada kerjasama dalam usaha kelompok tani agar dapat berkembang menjadi cluster kelompok tani yang agribisnis. Program penyuluhan dari BPP Dampit telah disusun dalam RKTPP, misalnya pada bulan 1 (pertama) berupa kegiatan menyampaikan materi dan praktik langsung mengenai budidaya tanaman kopi dengan GAP (penjelasan GAP ada pada subbab berikutnya). Pada bulan ke 2 (dua) berupa kegiatan menyampaikan materi mengenai cara pangkas pohon kopi yang benar dan sistem pemilihan biji yang baik.

Program penyuluhan diberikan oleh BPP Dampit kepada kelompok tani di 5 (lima) desa yang berpotensi sebagai pertanian kopi yaitu, Desa Bumirejo, Desa Sukodono, Desa Baturetno, Desa Srimulyo dan Desa Amadanom, yang mana 5 (lima) desa ini menerima penyuluhan setiap 1 (satu) kali dalam sebulan dan 12 (dua belas) kali dalam setahunnya. Program penyuluhan dari BPP Dampit bertujuan untuk materi sebelum dipraktikkan karena petani masih minim pengetahuan dalam budidaya tanaman yang bagus, waktu panen dan pascapanen. Dalam penyuluhan pertanian kepada para petani, pihak BPP Dampit memiliki kategori penilaian untuk setiap kelompok tani, yaitu dimulai dari katerogi kelas pemula, lanjut, madya dan utama. Kategori penilaian kelas yang paling tinggi adalah kelas utama, yaitu desa dengan kelompok tani yang berhasil dalam mengikutimenjalankan program penyuluhan yang diberikan. Kelompok tani yang mendapatkan penilaian kategori pemula, lanjut dan madya bukan berarti tidak dapat mengikuti/menjalankan penyuluhan yang

diberikan oleh BPP Dampit. Ketiga kelompok tani tersebut masih dalam tahap pembekalan/pembentukan agar menjadi kelompok tani yang mampu menghasilkan hasil panen yang baik dan memahami ilmu tani (Badan Penyuluhan Pertanian Dampit, n.d.). Program penyuluhan terhadap kelompok tani di 5 (lima) desa tersebut di atas, sejalan dengan program unggulan BPP Dampit yaitu “Peningkatan kapasitas kelembagaan tani sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan pertanian” (Badan Penyuluhan Pertanian Dampit, 2021).

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Kopi Robusta Kecamatan Dampit 2016-2019

Tahun	2017	2018	2019
Luas Panen	2.965 ha	2.965 ha	3.373 ha
Jumlah Produksi	2.387 ton	2.387 ton	2.641 ton

Sumber: Oalah Penulis (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2020).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada peningkatan luas panen dan jumlah produksi pada tahun 2017 s/d 2018, walau pada tahun-tahun tersebut BPP Dampit telah terbentuk dan telah melaksanakan program penyuluhan kepada para petani kopi. Penurunan luas panen dan jumlah produksi kopi pada kedua tahun tersebut disebabkan oleh iklim dan cuaca (Silitonga, 2022b). Meskipun stagnan pada tahun 2017 s/d 2018, luas panen dan jumlah produksi di Kecamatan Dampit tetap lebih tinggi dibanding kecamatan lain di Kabupaten Malang hingga tahun 2019.

2) Pihak Swasta: PT Asal Jaya dalam Tata Kelola Hasil Pertanian Kopi Dampit Berkualitas Ekspor

Dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan produk unggulan desa sesuai misi pembangunan Kabupaten Malang; BPP Dampit menjalin kerjasama dengan pihak PT Asal Jaya. Hal ini juga sejalan dengan program unggulan BPP Dampit yaitu “Peningkatan sinergitas dengan stakeholder dalam

membangun dan mengembangkan jejaring argibisnis” (Badan Penyuluhan Pertanian Dampit, 2021).

PT Asal Jaya mulai mengeksport kopi sejak tahun 2010-an, dimana pemerintah daerah pada saat itu belum melakukan penyuluhan kepada para petani kopi di Dampit (Silitonga, 2022b). Posisi PT Asal Jaya dalam tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor di Dampit adalah sebagai pemberi bantuan kepada para petani kopi sejak tahun 2016-2021 (Silitonga, 2022a). Bantuan yang diberikan oleh pihak PT Asal Jaya kepada petani di Dampit adalah berupa pupuk, mesin pertanian seperti mesin sangrai, *pulper* dan *huller*; juga memberikan ternak kambing dengan jumlah 10 (sepuluh) ekor untuk setiap desa di Kecamatan Dampit melalui BPP Dampit. Pemberian bantuan ternak kambing tersebut telah memberi manfaat kepada para petani karena kotoran hewan ternak tersebut dijadikan sebagai pupuk alami. Bantuan yang diberikan oleh PT Asal Jaya tidak dalam bentuk dana langsung karena untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana. Adapun para petani yang mendapatkan bantuan dari PT Asal Jaya berasal desa Bumirejo, Sukodono, Baturetno, Srimulyo dan Amadanom.

Menurut pihak PT Asal Jaya, walau pihak swasta ini berposisi sebagai pemberi bantuan kepada para petani melalui BPP Dampit, namun tidak memaksa para petani kopi untuk menjual hasil panen kopi ke PT Asal Jaya (Silitonga, 2022e). Para petani kopi asal Dampit bebas untuk menjual hasil panen kopi kemana saja. Selanjutnya pihak PT Asal Jaya menyampaikan bahwa hingga tahun 2021, 90% petani kopi di Dampit selalu menjual hasil panen kopinya ke PT Asal Jaya. Hal ini karena harga beli kopi yang ditawarkan oleh PT Asal Jaya kepada para petani lebih tinggi daripada harga beli kopi yang ditawarkan oleh toko-toko besar di pasar, yaitu dengan perbandingan Rp. 1.000,-/kg. PT Asal Jaya menghargai biji kopi sebesar Rp. 25.000,-/kg, sedangkan toko-toko di pasar Rp. 24.000,-/kg. Namun demikian, masih ada beberapa petani yang menjual biji kopi mereka ke toko-toko besar di pasar karena para petani tersebut diberi kemudahan dalam mengambil barang-barang kebutuhan hidup di pasar dengan sistem hutang; atau dengan kata

lain ketika tiba saat panen, maka hasil panen kopi diberikan ke toko-toko besar tersebut untuk membayarkan hutang petani.

Dalam penelitian ini, *buyer* atau pembeli dari luar negeri juga merupakan pihak swasta yang ikut andil dalam tata kelola hasil pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor. Tanpa permintaan *buyer* luar negeri, tentu kopi asal Dampit ini tidak dapat dipasarkan keluar negeri. Sejauh ini PT Asal Jaya telah memiliki pangsa pasar luar negeri di 45 (empat puluh lima) negara yang berada di benua Asia, Amerika, Australia dan Eropa (Silitonga, 2022e). Kegiatan ekspor kopi yang dilakukan PT Asal Jaya, tentu membutuhkan peran para petani kopi Dampit yang mampu memenuhi permintaan pasar global yaitu standar kualitas kopi ekspor. Selain itu, kegiatan ekspor kopi yang dilakukan PT Asal Jaya harus memenuhi prosedur ekspor yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, PT Asal Jaya secara langsung menghubungkan para petani kopi dengan pasar internasional. PT Asal Jaya melakukan ekspor kopi kurang lebih 55.000 ton setiap tahun. Namun demikian, biji kopi yang diekspor oleh pihak swasta ini tidak hanya berasal dari Dampit atau pun Kabupaten Malang saja, melainkan dari beberapa wilayah di Indonesia seperti Bengkulu dan Sumatera.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Kopi, menyebutkan bahwa kopi yang diekspor harus dalam bentuk biji yang telah dihilangkan kafeinnya; eksportir harus terdaftar dalam Eksportir Terdaftar Kopi (EKT); memiliki Surat Keterangan Asal Form ICO untuk membuktikan bahwa kopi dihasilkan dan diolah di Indonesia; juga harus melengkapi Surat Persetujuan Ekspor (SPEK) adalah surat untuk pelaksanaan ekspor ke seluruh Negara yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan provinsi/kabupaten, dan surat SPEK ini juga dapat digunakan untuk pengepalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia. Perusahaan ekspor seperti PT Asal Jaya harus memenuhi syarat prosedur kepabean sebagai berikut: Memiliki Badan hukum dalam bentuk (Portal Informasi Indonesia, 2019): CV, Firma, PT, Persero, Perjan dan Koperasi; Memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak); Mempunyai

Surat Izin Perdagangan dan Izin Usaha Perdagangan serta Surat Izin Industri dan Dinas Perindustrian; Memiliki Surat Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kopi yang diekspor juga harus memenuhi syarat karantina ekspor, yaitu kopi dikarantina selama seminggu untuk memeriksa apakah semua syarat-syarat ekspor sudah terpenuhi mulai dari berkas permendag, hingga berkas kepabean seperti penjelasan diatas. PT Asal Jaya selalu memenuhi syarat-syarat ekspor kopi yang ada. Dengan bantuan pemerintah dan pihak swasta, kopi asal Dampit telah bersertifikat *Common Code for Coffee Community* (4C), dimana program penyuluhan dan pelatihan oleh BPP Dampit sesuai dengan standarisasi dan disertifikasi 4C. Sertifikat 4C juga merupakan salah satu syarat ekspor ke pasar internasional. Program pelatihan standar sertifikasi 4C diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertanian kopi.

3) Masyarakat: Petani Kopi dalam Tata Kelola Hasil Pertanian Kopi Dampit Berkualitas Ekspor

Sebagaimana penjelasan pada subbab sebelumnya, bahwa dalam tata kelola hasil pertanian kopi Dampit, terdapat kelompok tani yang tersebar di 5 (lima) desa. Dengan hubungan jejaring dengan pihak swasta, yaitu PT Asal Jaya dalam ekspor kopi telah mendorong para petani untuk meningkatkan produksi pertanian kopi dan meningkatkan kualitas kopi agar laku di pasar pasar internasional (Badan Penyuluhan Pertanian Dampit, n.d.). Para petani kopi menduduki posisi yang penting dalam tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor, baik sebagai penerima program penyuluhan dari BPP Dampit; maupun sebagai pelaksana praktik tanam, pemeliharaan kopi dan peningkatan produksi kopi berkualitas ekspor.

Analisis Tata Kelola Hasil Pertanian Kopi Dampit Berkualitas Ekspor

Penjelasan konseptual mengenai *governance* dan *good governance* pada subbab sebelumnya, digunakan penulis sebagai pisau

analisis untuk memahami tata kelola hasil pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor. Tata kelola hasil pertanian kopi pada penelitian ini diartikan sebagai suatu interaksi antara pemerintah, dengan warga negara yaitu pihak swasta (perusahaan eksportir kopi) dan masyarakat (petani kopi di Dampit) untuk menentukan mekanisme tata kelola pertanian kopi maupun mekanisme pemasaran kopi ke pasar internasional dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Dalam tata kelola hasil pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor, pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat menjalankan peran masing-masing. Mekanisme tata kelola pertanian dan mekanisme pemasaran kopi ke pasar internasional yang terbentuk melalui interaksi tersebut, bukan hanya bertumpu pada peran produktif dari pemerintah. Peran produktif seluruh petani kopi hingga tingkat lokal dan pihak swasta juga dibutuhkan.

Dalam tata kelola hasil pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor, pemerintah daerah menduduki posisi penting untuk meningkatkan potensi unggulan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Malang melalui BPP Dampit yang berada di bawah naungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dituntut agar mampu mewujudkan petani kopi yang mandiri dan berdaya saing, sehingga para petani kopi Dampit meningkat kesejahterannya. Posisi BPP Dampit adalah sebagai aktor atau bisa pula disebut sebagai guru yang mendorong para petani untuk bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian kopinya agar laku di pasar internasional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga petani kopi. Hal tersebut dapat dilihat dari luas panen dan jumlah produksi kopi setiap tahunnya dan juga harga beli kopi dari pihak swasta baik PT Asal Jaya maupun toko-toko besar di pasar Dampit yang menguntungkan para petani kopi. Sejauh ini komunikasi antara pihak BPP Dampit dengan para petani kopi telah dilaksanakan secara rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari program penyuluhan oleh BPP Dampit yang dilaksanakan sebulan sekali; juga pendampingan yang berikan BPP Dampit kepada para petani kopi. Selain itu, BPP Dampit

juga memberi ruang diskusi bagi para petani kopi mengenai kendala-kendala yang dirasakan dan apa yang dibutuhkan para petani yang ikut dalam program penyuluhan.

Berikut ini merupakan program penyuluhan kepada petani kopi Dampit yang mencerminkan interaksi pemerintah dengan pihak swasta dan petani kopi (Silitonga, 2022e). Pertama, *Good Agricultural Practices* (GAP) yaitu pemahaman tentang budidaya tanaman kopi yang baik dan benar agar para petani mampu mengatasi segala permasalahan mengenai budidaya tanam. Misalnya: pemilihan biji kopi yang baik untuk ditanam. Kedua, *Good Manufacturing Practices* (GMP) yaitu metode pelatihan cara pengolahan hasil kopi yang baik dan benar agar menghasilkan produk kopi yang bermutu, aman, mempunyai cita rasa yang tinggi, layak dikonsumsi dan berdaya saing tinggi. Misalnya: pemilihan biji kopi yang lebih baik pada saat pengupasan dan penyangraian biji kopi. Ketiga, *Access to Finance Practices* (AFP) yaitu akses pada praktik keuangan yang dapat membentuk gabungan kelompok tani. Misalnya: pemberian penyuluhan tentang pascapanen dan panen yang baik. Keempat, *Sustainable Agricultural Business Cluster* (SABC) yaitu dengan membentuk gabungan kelompok agar petani mampu mandiri dan membantu pengelolaan potensi wilayah masing-masing; juga membantu pengelolaan tatanan perekonomian para petani. Dengan kelembagaan tersebut, petani diharapkan mampu mempengaruhi ekonomi perdesaan yang berguna untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Kelima, *Farmer Driven Research* (FRD) yaitu lahan percontohan yang terintegrasi pada kebun kopi dengan tujuan untuk mengoptimalkan semua komponen ekosistem yang ada di kebun kopi, memanfaatkan peluang usaha dalam suatu areal kebun kopi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pembibitan kopi unggulan yang sesuai anjuran (tiap daerah memiliki perbedaan potensi tanaman kopi). Setiap pelaksanaan penyuluhan tersebut, BPP Dampit selalu mengirimkan undangan kepada pihak PT Asal Jaya tapi kehadiran pihak swasta tersebut tidak sebagai pemateri, melainkan

sebagai pemberi arahan-arahan agar petani kopi dapat melaksanakan program penyuluhan dengan maksimal. Pelaksanaan program penyuluhan tersebut mengikuti jadwal yang diberikan oleh pihak BPP Dampit yaitu, sebulan sekali.

Selain penjelasan di atas, keterlibatan PT Asal Jaya sebagai pihak swasta yang dalam tata kelola hasil pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor diwujudkan dalam pemberian bantuan nontunai kepada para petani kopi yaitu pupuk, mesin pengupas kopi dan penyangrai biji kopi melalui BPP Dampit. Interaksi antara pemerintah daerah melalui BPP Dampit dan PT Asal Jaya diwujudkan dalam kegiatan pembinaan kepada para petani hingga berhasil memproduksi kopi yang memenuhi standar 4C untuk sertifikasi ekspor. PT Asal Jaya berkontribusi dalam memasarkan hasil pertanian kopi ke pasar internasional melalui interaksi perusahaan tersebut dengan *buyer* atau pembeli dari luar negeri.

PT Asal Jaya membeli hasil panen kopi para petani dengan harga Rp. 25.000,-/kg yang dinilai lebih tinggi sebesar Rp.1000,- dibanding toko-toko besar di Pasar Dampit. Namun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan bahwa harga kopi di Kabupaten Malang tidak pernah beranjak naik sejak tahun 2000-an hingga Oktober 2020, yaitu berkisar Rp. 20.000,- hingga Rp. 25.000,-. Hal tersebut menyebabkan para petani, khususnya di Kecamatan Dampit mengeluh (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2020). Menurut seorang petani kopi di Dampit, salah satu penyebab harga komoditas kopi stagnan selama belasan tahun karena dikuasi oleh pedagang besar di Pasar Dampit (Wahyudi, 2020). Bahkan harga kopi mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu berkisar Rp. 22.500,- s/d Rp. 23.000,- per kilogram. Menurut sebagai petani, penurunan harga tersebut hanya pada kopi yang dijual ke pabrik guna ekspor karena harga komoditas kopi di pasar global juga mengalami penurunan. Sebaliknya, harga kopi yang dijual ke pasar nasional untuk warung dan café lebih stabil (Werdiono, 2019). Salah satu penyebab dari kestabilan harga komoditas

kopi di pasar nasional dan pasar lokal (pasar di Kabupaten Malang) yaitu ada peningkatan konsumsi kopi di Kabupaten Malang. Konsumsi kopi di Kabupaten Malang pada tahun 2016 mencapai 0,8 kg/orang dan mencapai 1,2 kg/orang pada tahun 2017 (Jawa Pos, 2018). Jadi ada peningkatan konsumsi kopi sebanyak 20% sejak 2016 s/d 2017. Peningkatan konsumsi kopi di Kabupaten Malang juga didukung jumlah *outlite* kopi yang bertambah. Dengan demikian, tata kelola pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor belum maksimal karena mekanisme penetapan harga komoditas kopi di pasar nasional maupun pasar internasional belum mampu menjamin keuntungan dan peningkatan kesejahteraan petani. Seharusnya interaksi antara BPP Dampit dengan PT Asal Jaya maupun dengan para petani kopi mampu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pertanian.

Keterlibatan petani kopi dalam tata kelola hasil pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor diwujudkan melalui respon para petani terhadap program penyuluhan dari BPP Dampit dan PT Asal Jaya. Hampir seluruh petani kopi dari 5 desa (Desa Bumirejo, Sukodono, Baturetno, Srimulyo dan Amadanom) mengikuti program tersebut. Petani kopi di Kecamatan Dampit berjumlah 25 (dua puluh lima) kelompok tani (Silitonga, 2022c). Pada kegiatan penyuluhan dari pemerintah dan pihak, masih ada beberapa anggota kelompok tani yang pasif, yaitu tidak rutin mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan setiap bulan. Ada 3-4 (tiga hingga empat) anggota kelompok tani yang selalu pasif di lima desa yang diberikan penyuluhan. Namun setelah 1-2 tahun program penyuluhan dari pemerintah beserta pihak swasta berlangsung setiap bulan, para petani mulai aktif dan rutin dalam penyuluhan. Hal tersebut karena dampak yang dirasakan para petani melalui penyuluhan dari pemerintah dan pihak swasta, dimana para petani difasilitasi alat pertanian yang modern untuk efisiensi pengelolaan pertanian (Silitonga, 2022d). Tata kelola pertanian kopi Dampit berkualitas ekspor tidak lepas dari hambatan berupa iklim dan cuaca seperti pada tahun 2017 s/d 2018. Iklim

dan cuaca merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan komoditas kopi berkualitas ekspor.

SIMPULAN

Tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur melibatkan pemerintah daerah melalui BPP Dampit; pihak swasta yaitu PT Asal Jaya sebagai eksportir kopi; dan masyarakat yaitu petani kopi Dampit. Interaksi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat diwujudkan melalui program penyuluhan pertanian kopi oleh Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit yang berkerjasama dengan PT Asal Jaya kepada petani kopi dan bantuan alat pertanian modern kepada petani kopi. Interaksi juga diwujudkan melalui aktivitas jual-beli kopi dan mekanisme dalam pemasaran kopi ke pasar internasional. Bantuan dari pemerintah maupun swasta berupa alat pertanian modern telah memberikan dampak terhadap efisiensi hasil panen kopi milik petani. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh BPP Dampit dan PT Asal Jaya telah berdampak pada peningkatan produksi kopi yang berkualitas ekspor dan ditandai dengan sertifikasi 4C pada kopi asal Dampit. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian maupun kementerian terkait; pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan BPP Dampit telah menjalankan peran sebagai aktor yang menciptakan mekanisme resmi dalam pengelolaan pertanian kopi, dan prosedur atau syarat pemasaran kopi ke pasar internasional. Namun pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah masih lemah dalam menciptakan mekanisme harga komoditas kopi di pasar nasional sehingga harga komoditas kopi di Dampit stagnan selama belasan tahun; juga belum mampu mengatasi masalah penurunan harga komoditas kopi di pasar global.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menawarkan saran agar tata kelola pertanian kopi berkualitas ekspor di Dampit bukan hanya meningkatkan produksi kopi berkualitas ekspor tapi juga meningkatkan kesejahteraan dan perokomonian keluarga petani kopi.

1. Peningkatan peran produktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memonitor dan mengatasi monopoli harga komoditas kopi yang dilakukan oleh pedagang besar,
2. Pemetaan dan pengkajian bantuan pertanian dari pemerintah maupun pihak swasta kepada para petani kopi berdasarkan urgensi dan kebutuhan mendesak para petani, seperti bantuan pupuk bersubsidi, alat pertanian modern, bibit unggul tanaman kopi maupun bantuan modal untuk para petani kopi,
3. Peran produktif pemerintah dan pihak swasta dalam mengatasi penurunan harga komoditas kopi di pasar global.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam membahas interaksi perusahaan eksportir kopi dengan buyer atau pembeli dari luar negeri dan juga masalah ketersediaan pupuk yang menjadi hambatan dalam tata kelola pertanian kopi berkualitas ekspor. Saran penulis kepada peneliti yang tertarik membahas tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor, yaitu kajian yang lebih dalam mengenai kedua hal tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada BPP Dampit, PT Asal Jaya dan juga para petani kopi di Kecamatan Dampit yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi, hingga dapat menghasilkan artikel karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqarni, W., Farnanda, F., & Hamzali, S. (2020). Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep Value Chain Governance. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 150–163.
<https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.19039>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2020). *Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ketiga Pertama Bulan Oktober 2020 19 s.d 23 Oktober 2020* (Issue November 2020).
- Badan Penyuluhan Pertanian Dampit. (n.d.). *Dokumen Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dampit*.
- Badan Penyuluhan Pertanian Dampit. (2021). *Dokumen Profil Badan Penyuluhan Pertanian Dampit tahun 2021*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. (2020). *Kabupaten Malang Satu Data Edisi 2020*.
https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-Kabupaten_Malang_Satu_Data_2020_revisi_2.pdf
- Jawa Pos. (2018). *Konsumsi Kopi di Kabupaten Malang Meningkat 20 Persen*. Jawa Pos.
<https://www.jawapos.com/jpg-today/25/01/2018/konsumsi-kopi-di-kabupaten-malang-meningkat-20-persen/>
- Kafasaskya, R. R. (2020). Analisis Rantai Nilai Global: Aktivitas Ekspor Komoditas Jagung Provinsi Nusa Tenggara Barat Ke Pasar Filipina. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(1), 67–84.
<http://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/view/14>
- Malang Times. (2017). *Kopi Amstirdam Malang Termasuk Kopi yang Paling Diburu di Dunia*.
<https://www.malangtimes.com/baca/18638/20170531/171628/kopi-amstirdam-malang-termasuk-kopi-yang-paling-diburu-di-dunia>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Munashiroh, A. F., & Santoso, E. B. (2021). Pengembangan Sektor Unggulan Komoditas Kopi di Kabupaten Malang dengan Konsep Agribisnis. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2).
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.56336>
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2019). *Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut*:
<https://www.malangkab.go.id/mlg/default/page?title=misi-kabupaten-malang>
- Portal Informasi Indonesia. (2019). *Syarat Menjadi Eksportir dan Prosedur Kepabeannya*No Title.
<https://indonesia.go.id/kategori/kepeanaan/436/syarat-menjadi-eksportir-dan-prosedur-kepeannya>
- Rahim, A. (2019). Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(3), 133.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Laksbang.
- Sembiring, R. A., & Subekti, T. (2021). Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 31.
<https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.30416>
- Silitonga, V. S. (2022a). *Wawancara dengan CF di Badan Penyuluhan Pertanian Dampit*.
- Silitonga, V. S. (2022b). *Wawancara dengan JSS di Badan Penyuluhan Pertanian Dampit*.
- Silitonga, V. S. (2022c). *Wawancara dengan M (petani kopi) di Badan Penyuluhan Pertanian Dampit*.
- Silitonga, V. S. (2022d). *Wawancara dengan S (petani kopi) di Badan Penyuluhan Pertanian Dampit*.
- Silitonga, V. S. (2022e). *Wawancara dengan Z, pihak PT Asal Jaya di di Eco Wisata Kebun Kopi Amadon Dampit*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tabloid Jawa Timur. (2020). *Kopi, Tetap Jadi Primadona Ekspor Kabupaten Malang*.
- TPSA (Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project). (2017). *Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Kopi Indonesia*.
<http://www.tpsaproject.com/wp-content/uploads/2018-01-30-Report-IDN-1211.03c.pdf>

Wahyudi, G. (2020). *Belasan Tahun Harga Stagnan, Petani Kopi Dampit Malang Sambat*. Suara Indonesia. <https://suaraindonesia.co.id/news/ekonomi/5f64d7c85cb52/belasan-tahun-harga-stagnan-petani-kopi-dampit-malang-sambat>

Werdiono, D. (2019). *Harga Rendah, Sebagian Petani di Dampit Pilih Tahan Jual Kopi*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/12/20190812wer-harga-rendah-sebagian-petani-di-dampit-pilih-tahan-jual-kopi>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license